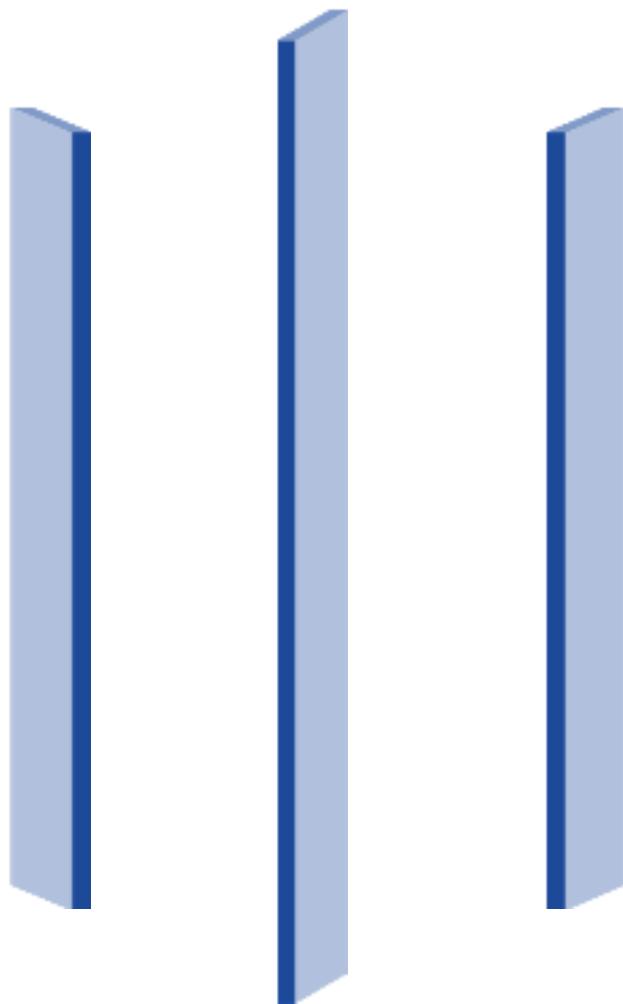




## LAPORAN CAPAIAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
KECAMATAN SUNGAI PINANG**

**Triwulan II Tahun 2024**

## KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Banjar telah menyusun Laporan Kinerja Triwulan untuk sebagai perwujudan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Bertujuan untuk menilai progress pencapaian target kinerja hasil (outcome) dan keluaran (output) yang telah ditetapkan di awal tahun 2024. Laporan ini juga merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan program/kegiatan berlangsung (intermediate evaluation) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk dapat memenuhi target sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah disepakati oleh masing masing Perangkat Daerah.

Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akhirnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi komprehensif mengenai progress pencapaian target dalam mewujudkan kondisi ideal yang diinginkan melalui indikator kinerja yang terukur. Informasi yang tertuang dalam laporan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan, sehingga upaya pelaksanaan kegiatan menjadi lebih optimal. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Kritik, masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan ke depan.

Sungai Pinang, 01 Juli 2024

Camat Sungai Pinang



MARWATA, SE  
NIP. 19690217 198903 1 003

## DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	1
1.3 Dasar Hukum.....	1
	2
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	3
2.1 Perjanjian Kinerja.....	3
BAB III. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN.....	3
3.1 Realisasi kinerja sasaran strategis.....	3
3.2 Realisasi kinerja kegiatan.....	4
3.3 Realisasi kinerja subkegiatan.....	8
BAB IV. REALISASI ANGGARAN.....	28
BAB V. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT.....	32
LAMPIRAN .....	34

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Salah satu prinsip dalam tata cara kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

Penyelenggaraan kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi objektif perencanaan stategis, target dan capaian kinerja serta evaluasi capaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama dan/atau Penetapan Kinerja Perangkat Daerah pada lingkungan Kecamatan Sungai Pinang.

#### 1.2 MAKSD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pencapaian kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.
2. Memberi gambaran tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.
2. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja pada Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar.

#### 1.3 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten

## LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

### KECAMATAN SUNGAI PINANG

#### II. PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Camat Banjar Tahun 2024, yang menjadi tanggung jawab bagian Kecamatan Sungai Pinang sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	77	Nilai	Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	Indek	74,00	1.983.661.150	Camat
					Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase	100%	10.230.000	Camat
					Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase	100%	56.317.00	Camat

					Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persentase	100%	20.233.000	Camat
					Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase	100%	157.283.500	Camat
					Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase	100%	9.676.000	Camat
2.	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan Umum dan kepegawaian	Penilaian Mandiri Indeks kepatuhan dan kinerja Intern (IKKI) Kec.Sungai Pinang	76	Indeks	Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Penilaian Mandiri Indeks kepatuhan dan kinerja Intern (IKKI) Kec.Sungai Pinang	Indeks	76	2.271.964.048	Sekcam
3.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	Persentase	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persentase	100	4.039.60	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset

4.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persentase	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	1.843.220.92	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset
5.	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	Persentase	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persentase	100	9.648.800	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset
6.	Tersusunnya Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Terpenuhi	100	Persentase	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Terpenuhi	Persentase	100	10.770.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persentase	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	103.175.800	Kasubag Umum dan Kepegawaian

8.	Tersedianya Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persentase	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Persentase	100	11.070.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
9.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persentase	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	201.028.920	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persentase	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase	100	89.010.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
11.	Terselenggaranya Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persentase	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase	100	3.503.400	Kasi Kessos

12.	Tercapainya Persentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Persentase koordinasi kegiatan Kessos yang dilaksanakan	100	Persentase	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase koordinasi kegiatan Kessos yang dilaksanakan	Persentase	100	23.201.000	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
13.	Tercapainya Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase koordinasi dan fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dikecamatan	100	Persentase	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi dan fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dikecamatan	Persentase	100	44.723.500	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
14.	Tercapainya Fasilitasi Penanganan ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100	Persentase	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase	100	38.603.500	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
15.	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persentase	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Persentase	100	4.773.000	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
16.	Meningkatnya Penyelenggaraan	Persentase penyelenggaraan	100	Persentase	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan	Persentase	100	151.339.500	Kepala Seksi Pemerintahan

	Urusan Pemerintahan Umum	urusan pemerintahan umum			Sesuai Penugasan Kepala Daerah	urusan pemerintahan umum				
15.	Tercapainya fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persentase	Fasilitasi Rekomendasi,Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase	100	11.397.700	Kepala Seksi Pemerintahan

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Pinang memiliki 6 sasaran strategis dengan 7 indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2024 merupakan kinerja tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar Periode 2022-2026. Hal ini karena capaian atas target masing-masing IKU hampir seluruhnya dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2023), terdapat beberapa IKU yang nilainya dapat dilihat per triwulan. Adapun capaian kinerja utama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan II Tahun 2024 yang diuraikan berdasarkan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Targ et	Satuan	Capaian	Persen se Capaian
1	2	3	4	5	6	7	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang  (Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten)	77	Nilai	0	0
1.	Terselenggaranya urusan penyusunan program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern = $\Sigma$ (Unsur kinerja utama x 40%) + ( Unsur kepatuhan x 30%) + ( Unsur Pelayanan Umum x 30 %)	76	Person	0	0
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang telah disusun dibagi Jumlah Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi yang harus disusun dikali 100%	100	Person	23.53%	23.53%
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, perangkat daerah yang tersusun	14	Dokumen	4	22.35%
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	20	Laporan	6	29.00%

	<b>Pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dibagi jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%</b>	<b>100</b>	<b>Perse</b>	<b>22.1%</b>	<b>22.1%</b>
	Tersedanya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	168	Orang/ bulan	35	41.09%
No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Targ et	Satuan	Capaian	Persenta se Capaian
	1	2	3	4	5	6	7
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	6	46.00%
	Tersedanya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1	100 %
	<b>Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah perangkat daerah yang berkualitas</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan dibagi Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	100%
	<b>Lancarnya administrasi kepegawaian daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi</b>	<b>Jumlah Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi dibagi Jumlah Administrasi Kepegawaian yang direncanakan x 100%</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang	0	0.00%

		Perundang-Undangan	Undangan yang difasilitasi				
	<b>Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor</b>	<b>Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan Umum kantor yang dilaksanakan dibagi Jumlah kegiatan umum yang direncanakan x 100%</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>6</b>	<b>45.50%</b>
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	0	0.00%
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	1	19,87%
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	3	85.00%
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	4	Paket	1	25.00%

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Tar get	Satuan	Capaian	Persenta se Capaian
1	2	3	4	5	6	7	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti/diselenggarakan	12	Laporan	6	50.00%
	<b>Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi dikali 100%</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>20.00%</b>	<b>6.67%</b>
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	unit	1	6.67%
	<b>Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>24.32%</b>	<b>24.32%</b>

	<b>Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi</b>	<b>Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi</b>	<b>Daerah yang Terfasilitasi yang disediakan dibagi Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi yang direncanakan x 100%</b>				
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disediakan	12	Laporan	5	28.05%
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	3	25.00%
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	Laporan	5	45.73%
	<b>Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi yang dipelihara dibagi jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi yang direncanakan x 100%</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>30.77%</b>	<b>23.08%</b>

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Tar get	Satuan	Capaian	Persenta se Capaian
1	2	3	4	5	6	7	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	unit	3	36.82%
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	unit	2	33.33%
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	unit	1	50.00%

	i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dipelihara/Direhabilitasi				
II.	<b>Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan</b>	<b>Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan yang direncanakan dikali 100%</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>33.33%</b>	<b>6.67%</b>
	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan yang diselenggarakan dibagi Jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>66.67%</b>	<b>0.00%</b>
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang Dilaksanakan	3	Laporan	1	26.78%
	<b>Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	Persentase Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	<b>Jumlah Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan yang diselenggarakan dibagi Jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%</b>	<b>100</b>	<b>PerSEN</b>	<b>25.00%</b>	<b>8.33%</b>
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang Dilaksanakan	12	Laporan	1	8.33%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Targ et	Satuan	Capaian	Persenta se
----	---------------------------------------	-------------------	-------------------------------	---------	--------	---------	-------------

							Capaian
	1	2	3	4	5	6	7
<b>III</b>	<b>Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan</b>	<b>Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dibagi jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan x 100%</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>26,5%</b>	<b>26,5%</b>
	Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan dibagi jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan dikali 100%	100	PerseN	44.44%	44.44%
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang Dilaksanakan	2	Lembaga Kemasyarakatan	2	100%
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	7	Laporan	2	28.57%
<b>IV</b>	<b>Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan</b>	<b>Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi trantibum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi yang direncanakan x 100%</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>16.67%</b>	<b>16.67%</b>
	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	jumlah penyelenggaraan trantibum yang terlaksana : jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100	persen	16.67%	16.67%
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	4	Laporan	2	50.00%

		Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan yang Dilaksanakan				
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang Dilaksanakan	2	Laporan	2	100%

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Targ et	Satuan	Capaian	Persenta se Capaian
							7
V	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan dibagi Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100%	100	Person	25.00%	25.00%
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penugasan yang dilaksanakan dibagi: Jumlah Upenugasan yang direncanakan x 100%	100	Person	25.00%	25.00%
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Dilaksanakan	1	Orang	0	0.00%
	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh	3	Dokumen	1	33.33%

		Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Instansi Vertikal yang Dilaksanakan				
<b>VI</b>	<b>Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan</b>	<b>Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana</b>	<b>Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terfasilitasi dibagi jumlah fasilitasi yang direncanakan x 100%</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>
	<b>Terselenggranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana dibagi Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang direncanakan X 100%</b>	<b>100</b>	<b>Perse</b> n	<b>50%</b>	<b>50%</b>
	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan	1	Dokumen	1	100%
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Dilaksanakan	11	Laporan	2	18.18%
Capaian Kinerja (%)							17.76%

Sasaran Kinerja Utama Kecamatan Sungai Pinang adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, dengan Indikator kinerja sasaran strategis Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan.

Kinerja Indikator EKK Triwulan II Tahun 2024 belum ada capaian karena penilaian Indikator EKK dilaksanakan oleh Tim penilai Kabupaten yaitu dari Bagian Organisasi. Walaupun penilaian EKK 2024 belum dilaksanakan.

## REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 sebesar Rp. 2.549.505.648,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 2.538.435.648,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 11.070.000,- Secara grafis, struktur anggaran Kecamatan Sungai Pinang tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

Untuk Realisasi jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.7 Realisasi Jenis Belanja

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase capaian
1	2	3	4	5
	Kecamatan Sungai Pinang	2.549.505.648	936.171.839	43.85%
1.	Belanja Operasi	2.538.435.648	936.171.839	43.85%
2.	Belanja Modal	11.070.000	4000.000	45%

Berdasarkan tabel diatas, serapan anggaran Kecamatan Sungai Pinang tercapai 43.85% yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.549.505.648,- terealisasi sebesar Rp. 936.171.839,-. Berdasarkan jenis belanja, Belanja Operasi tercapai 43.85% dari pagu anggaran Belanja Operasi sedang belanja modal terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,- serapan anggaran mencapai 45% dari pagu belanja modal. Gambaran capaian secara grafis dapat dilihat pada gambar berikut :

**Tabel 3.9**  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	Nilai Evaluasi Kecamatan	77	0	0	2.538.435.648	936.171.839	15.62%

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
						(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Terselenggranya urusan penyusunan program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	76	0	0	2.260.894.048	936.171.839	15.81%
1)	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100%	23.53%	23.53%	4.039.600	0	0.00%
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	3 Dokumen	21.43%	3.5000.00	354.000	10.00%
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	5 Laporan	25.00%	2.100.000	0	0.00%
2)	Pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	22.10%	22.10%	1.843.220.928	254.575.288	14.25%
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang/Bulan	27 Orang/Bulan	16.07%	1.811.216.128	773.779.284	41.07%
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3 Dokumen	25.00%	31.130.000	14.370.000	46.00%
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	874.800	0	0
3)	Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	0.00%	0.00%	9.000.000	3.750.000	41.11%
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0 Laporan	0.00%	9.734.000	3.750.000	23.11%
4)	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepergawaian yang terpenuhi	100%	0.00%	0.00%	10.000.000	0	0.00%
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	0 Orang	0.00%	10.000.000	0	0.00%

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
						(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5)	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	100%	12.50%	12.50%	201.028.920	30.848.941	27.64%
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	0 Paket	0.00%	749.500	0	0.00%
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	0 Paket	0.00%	2.163.000	430.000	0.00%
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	4 Paket	1 Paket	25.00%	3.500.000	444.500	7.63%
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	1 Paket	25.00%	2.763.300	150.000	3.46%
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	25.00%	82.250.000	33.778.940	41.00%
6)	<b>Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi</b>	100%	6.67%	6.67%	<b>11.070.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>49.37%</b>
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	6.67%	11.070.000	4.000.000	49.37%
7)	<b>Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi</b>	100%	24.32%	24.32%	<b>170.339.155</b>	<b>33.774.750</b>	<b>19.82%</b>
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3 Laporan	25.00%	1.750.000	0	0.00%
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	3 Laporan	25.00%	23.318.920	3.997.115	14.62%
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	3 Laporan	23.08%	175.960.000	80.500.000	45%
8)	<b>Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi</b>	100%	23.08%	23.08%	<b>89.010.000</b>	<b>33.062.500</b>	<b>42.66%</b>

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
						(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	2 Unit	22.22%	60.980.000	22.447.500	36.30%
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3 Unit	2 Unit	33.33%	8.050.000	615.000	7.56%
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	0.00%	19.980.000	10.000.000	50.05%
II	<b>Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kebencanaan kecamatan</b>	<b>Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>6.67%</b>	<b>6.67%</b>	<b>60.999.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>4.26%</b>
1)	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>26.704.400</b>	<b>5.000.000</b>	<b>14.00%</b>
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	0 Laporan	0.00%	26.704.400	5.000.000	0.00%
2)	<b>Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>Persentase Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan</b>	<b>100%</b>	<b>8.33%</b>	<b>8.33%</b>	<b>23.201.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>12.38%</b>
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1 laporan	8.33%	23.201.000	5.000.000	12.38%
III	<b>Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan</b>	<b>100%</b>	<b>26.50%</b>	<b>26.50%</b>	<b>44.723.500</b>	<b>7.735.500</b>	<b>19.98%</b>

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
						(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan						
1)	Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Percentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	44.44%	44.44%	44.723.500	7.735.500	19.98%
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 lembaga Kemasyarakatan	2 lembaga Kemasyarakatan	100%	8.038.500	5.685.500	70.71%
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	2 Laporan	28.57%	36.685.000	2.050.000	5.00%
IV	Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Percentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100%	16.67%	16.67%	43.376.500	10.150.000	35.00%
1)	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Percentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100%	16.67%	16.67%	38.603.500	14.100.000	35.00%
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	1 Laporan	25.00%	30.246.500	8.100.000	16.25%
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	0 Laporan	0.00%	8.357.000	6.000.000	70.00%
V	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Percentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	25.00%	25.00%	151.339.500	31.800.000	10.31%

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
						(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1)	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	25.00%	25.00%	151.339.500	31.800.000	10.31%
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	0 Orang	0.00%	59.128.500	14.150.000	19.00%
	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	1	33.33%	92.211.000	17.650.000	23.93%
VI	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	100%	16.67%	16.67%	11,397,700	1,900,000	14.28%
1)	Terselenggranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	16.67%	16.67%	11,397,700	1,900,000	14.28%
	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	1,848.000	0	0.00%

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
						(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	11 Laporan	2 Laporan	18.18%	1,900,000	1.900,000	15.90%
	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Laporan	2 Laporan	18.18%	2,200,000	0	15.90%
	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawatan Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawatan Desa	11 Laporan	2 Laporan	18.18%	1,749,700	0	
	Terlaksananya Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	11 Laporan	2 Laporan	18.18%	3,700,000	0	
<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG UTAMA</b>								
<b>BELANJA LANGSUNG PENDUKUNG</b>								
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>								

## BAB IV PENUTUP

Kinerja Pemerintah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar triwulan II Tahun 2024 sebagian besar telah tercapai dengan baik sesuai target. Dengan capaian kinerja ini diharapkan menjadi bahan dan evaluasi untuk pencapaian kinerja selanjutnya di triwulan berikutnya, diharapkan upaya dan kerjasama dari semua pihak baik pemangku kepentingan maupun pendukung lainnya dapat bekerjasama dengan lebih baik agar kinerja yang telah ditargetkan dapat tercapai.

### LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja PD
2. SK Penetapan Indikator Kinerja pada PD

Sungai Pinang, 01 Juli 2024





**PERJANJIAN KINERJA  
KECAMATAN SUNGAI PINANG  
TAHUN 2024**



Jl. Belimbing Raya No.02 Desa Sungai Pinang  
Kecamatan Sungai Pinang  
Kabupaten Banjar



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN SUNGAI PINANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARWATA, SE**  
Jabatan : CAMAT SUNGAI PINANG

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **H. SAIDI MANSYUR, S.I.KOM**  
Jabatan : BUPATI BANJAR

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 11 Januari 2024

**PIHAK KEDUA**  
**BUPATI BANJAR,**

**H.SAIDI MANSYUR, S.I.KOM**

**PIHAK PERTAMA**  
**CAMAT SUNGAI PINANG,**

  
**MARWATA, SE**  
Pembina/IV.a  
NIP.19690217 198903 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**CAMAT SUNGAI PINANG**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	77

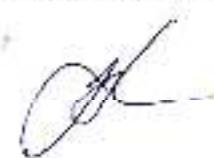
No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.271.964.048	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.704.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	44.723.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43.376.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	151.339.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.397.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Jumlah	2.549.505.648	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Martapura, 11 Januari 2024

**PIHAK KEDUA**  
**BUPATI BANJAR,**

**H. SAIDI MANSYUR, S.KOM**

**PIHAK PERTAMA**  
**CAMAT SUNGAI PINANG,**

  
**MARWATA, SE**  
Pembina/IV.a  
NIP. 19690217 198903 1 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN SUNGAI PINANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYAMSU RIZAL, S.SOS**  
Nip : 19730923 200901 1 003  
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **MARWATA, SE**  
Nip : 19690217 198903 1 003  
Jabatan : Camat Sungai Pinang

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari pejanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungai Pinang, 11 Januari 2024

Pihak Kedua

Camat

**MARWATA, SE**

Pembina/IV.a

NIP. 19690217 198903 1 003

Pihak Pertama

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial,

**SYAMSU RIZAL, S.SOS**

Penata Tk. I

NIP. 19730923 200901 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**  
**KECAMATAN SUNGAI PINANG**

No	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100 %
1.1	Tercapainya Persentase Pelayanan Paten	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	100 %
1.2	Tercapainya Persentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Persentase koordinasi kegiatan Kessos yang dilaksanakan	100 %

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	<b>Penyeieriggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	3.503.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.503.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	23.201.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	23.201.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Jumlah	26.704.400	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>

Sungai Pinang, 11 Januari 2024

Pihak Kedua  
Camat

Pihak Pertama  
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial,



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN SUNGAI PINANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H.ABDUL BAIS, SPD**  
Nip : 19670805 198608 1 001  
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat  
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **MARWATA, SE**  
Nip : 19690217 198903 1 003  
Jabatan : Camat Sungai Pinang

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditegakkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungai Pinang, 11 Januari 2024

**Pihak Kedua**  
**Camat**

**MARWATA,SE**  
Pembina/IV.a  
NIP. 19690217 198903 1 003

**Pihak Pertama**  
**Kepala Seksi Pemberdayaan**  
**Masyarakat,**

**H.ABDUL BAIS,SPD**  
Pembina/IV.a  
NIP.19670805 198608 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**KECAMATAN SUNGAI PINANG**

No	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercapainya Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dikecamatan	100 %
	Tercapainya Persentase Desa dan Kelurahan yang Melaksanakan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang Tepat Waktu	Persentase jumlah sub kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlaksanya	100 %

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>44.723.500</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.038.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.685.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Jumlah	<b>44.723.500</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Sungai Pinang, 11 Januari 2024

Pihak Kedua  
Camat

**MARWATA,SE**  
Pembina/IV.a  
NIP. 19690217 198903 1 003

Pihak Pertama  
Kepala Seksi Pemberdayaan  
Masyarakat,

**H.ABDUL BAIZ,SPD**  
Pembina/IV.a  
NIP.19670805 198608 1 001 .



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN SUNGAI PINANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. RUSMANI**  
Nip : 19670117 199003 1 009  
Jabatan : Kasi Pemerintahan  
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **MARWATA,SE**  
Nip : 19690217 198903 1 003  
Jabatan : Camat Sungai Pinang  
Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari pejanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungai Pinang, 11 Januari 2024

Pihak Kedua  
Camat .

**MARWATA, SE**  
Pembina/IV.a  
NIP. 19690217 198903 1 003

Pihak Pertama  
Kepala Seksi Pemerintahan.

**H.RUSMANI**  
Penata Tk.I  
NIP.19670117 199003 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KASI PEMERINTAHAN**  
**KECAMATAN SUNGAI PINANG**

No	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terfasilitasi	100 %
	<b>Tercapainya fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan</b>	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %
	Tercapainya fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	Persentase jumlah sub.kegiatan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan yang terlaksana	100 %

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	151.339.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dari Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	59.128.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.2	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Verikal	92.211.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.	<b>Fasilitasi Rekomendasi, Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	11.397.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Perizinan Kepala Desa	1.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.848.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2.4	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa	1.749.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.5	Fasilitasi Penataan,Pemanfaatan dan Penyalenggunaan Ruang desa serta Penelapan dan Penegasan Batas Desa	3.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Jumlah	<b>162.737.200</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>

Sungai Pinang, 11 Januari 2024

Pihak Kedua  
Camat,

**MARWATA, SE**  
Pembina/IV.a  
NIP. 19690217 198903 1 003

Pihak Pertama  
Kepala Seksi Pemerintahan,

**H.RUSMANI**  
Penata Tk. I  
NIP. 19670117 199003 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**  
**KECAMATAN SUNGAI PINANG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Terpenuhi	100%
2	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
3	Tersedianya Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100%
4	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
5	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN SUNGAI PINANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MULKAN, S.AP**  
NIP : 19740805 200103 1 001  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **SALAHUDDIN YUSUP, SH**  
NIP : 19720817 199803 1 011  
Jabatan : Sekretaris Camat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungai Pinang, 1 April 2024

Pihak Kedua  
Camat

Pihak Pertama  
Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepegawaian,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mulkhan".

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Salahuddin Yusup, SH".  
**SALAHUDDIN YUSUP, SH**  
Pembina/IV.a  
NIP. 19720817 199803 1 011

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mulkhan".  
**MULKAN, S.AP**  
Penata Muda/IIIa  
NIP. 19740805 200103 1 001

**SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**  
**KECAMATAN SUNGAI PINANG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Terpenuhi	100%
2	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
3	Tersedianya Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100%
4	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
5	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10.770.000</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>103.175.800</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	749.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.163.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.763.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.7	Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan	82.250.000	Dana Transfer

Konsultasi SKPD			Alokasi Umum
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>11.070.000</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.070.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>201.028.920</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.318.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>89.010.000</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Jumlah	<b>415.054.720</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Sungai Pinang, 1 April 2024

Pihak Kedua  
Sekretaris Kecamatan,



**SALAHUDDIN YUSUP, SH**  
Pembina/IV.a  
NIP. 19720817 199803 1 011

Pihak Pertama  
Kepala Sub Bagian Umum  
Kepegawaian.



**MULKAN, SAP**  
Penata Muda/IIIa  
NIP. 19740805 200103 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN SUNGAI PINANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALAHUDIN YUSUP, SH  
NIP : 19720817 199803 1 011  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MARWATA, SE  
Nip : 19690217 198903 1 003  
Jabatan : Camat Sungai Pinang

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari pejanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungai Pinang, 01 April 2024

Pihak Kedua  
Camat Sungai Pinang,

MARWATA, SE  
Pembina/IV.a  
NIP. 19690217 198903 1 003

Pihak Pertama  
Sekretaris Kecamatan

SALAHUDIN YUSUP, SH  
Pembina/IV.a  
NIP. 19720817 199803 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT**  
**KECAMATAN SUNGAI PINANG**

No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan Umum dan kepegawaian	Penilaian Mandiri Indeks kepatuhan dan kinerja Intern (IKKI) Kec.Sungai Pinang	76

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.271.964.048	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Jumlah	2.271.964.048	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Sungai Pinang, 01 April 2024

Pihak Kedua  
Camat Sungai Pinang

**MARWATA, SE**  
Pembina/IV.a  
NIP. 19690217 198903 1 003

Pihak Pertama  
Sekretaris Kecamatan

**SALAHUDIN YUSUP, SH**  
Pembina/IV.a  
NIP. 19720817 199803 1 011



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN SUNGAI PINANG

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. ERWIN APRIYANDI, A.Md**  
NIP : 19810411 201101 1 002  
Jabatan : Kepala Sub.Bagian Perencanaan,Keuangan dan Aset

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **SALAHUDIN YUSUP, SH**  
NIP : 19720817 199803 1 011  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari pejanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungai Pinang, 1 April 2024

Pihak Kedua  
Sekretaris Kecamatan  
Sungai Pinang

Pihak Pertama  
Kepala Sub Bagian Perencanaan,  
Keuangan dan Aset

**SALAHUDIN YUSUP, SH**  
Pembina/IV.a  
NIP. 19720817 199803 1 011

**M. ERWIN APRIYANDI, A.Md**  
Penata Muda/IIIa  
NIP. 19810411 201101 1 002

**KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET**  
**KECAMATAN SUNGAI PINANG**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100%
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.039.600</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	354.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	835.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	829.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.843.220.928</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.811.216.128	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.130.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	874.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>9.648.800</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	648.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Jumlah	1.856.909.328	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Sungai Pinang, 1 April 2024

Pihak Pertama  
Kepala Sub Bagian Perencanaan,  
Keuangan dan Aset

Pihak Kedua  
Sekretaris Kecamatan  
Sungai Pinang

  
**SALAHUDIN YUSUP.SH**  
Pembina/IV.a  
NIP. 19720817 199803 1 011

  
**M.ERWIN APRIYANDI, A.Md**  
Penata Muda/IIIa  
NIP. 19810411 201101 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN SUNGAI PINANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. ERWIN APRIYANDI,A. Md  
NIP : 19810411201101 1 002  
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Kesejahteraan

Sosial Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **MARWATA, SE**  
NIP : 19690217 198903 1 003  
Jabatan : Camat Sungai Pinang

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungai Pinang, 11 Juni 2024

Pihak Kedua  
Camat  
  
**MARWATA, SE**  
Pembina/IV a  
NIP. 19690217 198903 1 003

Pihak Pertama  
Plt. Kepala Seksi Kesejahteraan  
Sosial  
  
**M. ERWIN APRIYANDI,A. Md**  
Penata muda/IIIa  
NIP. 19810411201101 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**  
**KECAMATAN SUNGAI PINANG**

No	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100 %
1.1	Tercapainya Persentase Pelayanan Paten	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	100 %
1.2	Tercapainya Persentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Persentase koordinasi kegiatan Kessos yang dilaksanakan	100 %

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	3.503.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.503.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	23.201.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	23.201.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Jumlah	26.704.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Sungai Pinang, 11 Juni 2024

Pihak Kedua  
Camat

**MARWATA, SE**

Pembina/IV.a  
NIP. 19690217 198903 1 003

Pihak Pertama  
Pt. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial,

**M. ERWIN APRIYANDI, A. Md**  
Penata Muda/IIIa  
NIP. 19810411201101 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN SUNGAI PINANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SALADERI**  
NIP : 19680117 200701 1017  
Jabatan : Pengemudi

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **MULKAN, S.AP**  
NIP : 19740805 200103 1 001  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepegawaian

**MULKAN, S.AP**  
Penata Muda  
NIP. 19740805 200103 1 001

Sungai Pinang, 1 April 2024

Pihak Pertama  
Pengadministrasi Perkantoran  
Umum dan Kepegawaian

**SALADERI**  
Juru/tld  
NIP. 19680117 200701 1017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**PENGEMUDI MOBIL DINAS CAMAT**  
**KECAMATAN SUNGAI PINANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpeliharanya Kendaraan Roda 4 dengan baik	Jumlah laporan pemeliharaan Kendaraan Roda 4 yang dilaksanakan.	12 Laporan
2	Terkemudikannya Kendaraan sesuai dengan Printah Atasan	Jumlah Laporan Pengemudian Kendaraan Roda 4 yang dilaksanakan	12 Laporan

Sungai Pinang, 1 April 2024

Pihak Pertama  
Pengemudi



**SALADERI**

Juru/ttd

NIP. 19680117 200701 1017

Pihak Kedua

Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepegawaian



**MULKAN, S.AP**

Penata Muda

NIP. 19740805 200103 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN SUNGAI PINANG**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GUSTI M RIFANI, SE**  
NIPPPK : 19930803 202421 1 004  
Jabatan : Perencana Ahli Pertama

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **M ERWIN APRIYANDI, A.Md**  
NIP : 19810411 201101 1 002  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Kepala Sub Bagian Perencanaan,  
Keuangan dan Aset

**M ERWIN APRIYANDI, A.Md**  
Penata Muda III/a  
NIP. 19810411 201101 1 002

Pihak Pertama  
Perencana Ahli Pertama

**GUSTI M RIFANI, SE**  
Perencana Ahli Pertama  
NIPPPK. 19930803 202421 1 004

**PERENCANA AHLI PERTAMA KECAMATAN SUNGAI PINANG**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100%

Pihak Kedua  
 Kepala Sub Bagian Perencanaan,  
 Keuangan dan Aset

**M ERWIN APRIYANDI, A.Md**  
 Penata Muda III/a  
 NIP. 19810411 201101 1 002

Pihak Pertama  
 Perencana Ahli Pertama

**GUSTI M RIFANI, SE**  
 Perencana Ahli Pertama  
 NIPPPK. 19930803 202421 1 004

